



Contents lists available in [Journal IICET](#)

**JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)**

ISSN: 2541-3163(Print) ISSN: 2541-3317 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi>



## Analisis kesiapan program moderasi beragama di lingkungan sekolah/madrasah

Hendra Harmi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Jan 20<sup>th</sup>, 2022

Revised Feb 22<sup>th</sup>, 2022

Accepted Mar 25<sup>th</sup>, 2022

#### Keyword:

Moderasi Beragama  
Pendidikan Moderasi  
Peran Sekolah dan Madrasah

### ABSTRACT

Sekolah/madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang efisien untuk membangun nada moderat dalam pandangan dan tindakan keagamaan. Potret dan metode pendidikan harus dipromosikan dan diekspos kepada khalayak luas untuk menjadi prototipe dan model bagaimana moderasi beragama dibina pada siswa. Artikel ini membahas bagaimana sekolah/madrasah dipersiapkan untuk menjalankan program Moderasi Beragama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan sekolah/madrasah, ASN, dan pelaksana kebijakan dalam memenuhi maksud dan tujuan program moderasi beragama di lembaga pendidikan. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Kuesioner terbuka menyediakan alat pengumpulan data. Temuan studi menunjukkan bahwa sekolah/madrasah masih belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan program moderasi beragama. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya indikator yang belum terpenuhi oleh beberapa sekolah/madrasah untuk mensukseskan program moderasi beragama yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama.



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Harmi, H.,  
Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia  
Email: [harmihendra@gmail.com](mailto:harmihendra@gmail.com)

## Pendahuluan

Karena Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, itu pasti menjadi pusat perhatian ketika datang ke moderasi Islam. Ajaran utama Islam adalah moderasi. Menurut Dawing (2018), Islam moderat merupakan sikap teologis yang sangat penting dalam mengendalikan keragaman dalam segala aspek, termasuk agama, budaya, ras, dan bangsa itu sendiri. Akibatnya, moderasi beragama di Indonesia harus dipahami secara kontekstual bukan tekstual, artinya moderasi beragama di Indonesia merupakan cara memahami agama yang harus moderat/toleran karena Indonesia memiliki banyak budaya, tradisi, dan adat istiadat yang harus dilindungi. Kehadiran heterogenitas dalam bangsa Indonesia disebut juga dengan sunnatullah Allah. Terlepas dari keragaman, Allah menciptakan landasan persatuan umat (Ummatan Wahidah). Akibatnya, dalam kehidupan nyata, umat Islam diharapkan bersikap moderat (Ummatan Wasathiyah).

Dalam praktiknya, memilih jalan tengah atau moderasi dalam Islam dapat dibagi menjadi empat kategori: moderat dalam hal agama, ibadah, perangai, dan karakter, dan menantang dalam penciptaan syariah. Sementara itu, Harin percaya bahwa moderasi akan selalu hidup berdampingan dengan keseimbangan dan keadilan karena moderasi adalah aspek inti dari Islam (Az-Zafi, 2020). Pendidikan karakter moderasi Islami bagi anak sejak dini akan sangat mempengaruhi perkembangannya. Penerapan pendidikan karakter moderasi beragama tidak diragukan lagi penting dalam menawarkan kesadaran dan wawasan dimulai dengan

pendidikan di tingkat madrasah. Moderasi, menurut Kementerian Agama (2019), dalam buku Moderasi Agama, membutuhkan keterbukaan, penerimaan, dan kolaborasi di antara banyak kelompok, termasuk suku, budaya, dan agama. Mahasiswa yang memahami moderasi beragama akan mampu beroperasi dengan baik dalam masyarakat multikultural sebagai konsekuensinya.

Toleransi beragama tidak berarti memutarbalikkan fakta atau menghilangkan identitas satu sama lain. Manusia masih memiliki pendapat yang kuat tentang sesuatu, tentang kebenaran, tentang legalitas suatu situasi, tetapi dalam moderasi agama, manusia lebih menerima gagasan bahwa ada warga negara lain di luar kita yang memiliki hak yang sama dengan kita, berdasarkan kebangsaan, sebagai masyarakat yang berdaulat. Di luar keyakinan atau agama, setiap orang memiliki keyakinan yang harus diakui dan dihargai. Menurut Schwartz (2007), dua wajah Islam tidak dapat dipisahkan dari proses epistemologis yang mereka lalui, yang secara sosial budaya beragam: wajah Islam yang ramah, bersahabat, toleran, dan inklusif yang ingin hidup berdampingan dengan Islam. penganut berbagai agama. dan menganggap keragaman sebagai berkah; dan kedua, wajah Islam yang marah, mudah tersinggung, tidak toleran, dan eksklusif, yang merupakan musuh dari wajah pertama Islam.

Dewasa ini, minimnya minat untuk membenarkan fakta atau ilmu agama yang mudah diperoleh anak muda, khususnya mahasiswa, membuat bingung perilaku mereka. Sebagai contoh, penelitian PPIM UIN Jakarta (2017) terhadap mahasiswa, pengajar, dan dosen dari 34 provinsi di Indonesia menemukan bahwa 34,3 persen responden menunjukkan permusuhan terhadap orang non-agama (non-Muslim). Selain hasil yang meresahkan, 48,95 persen responden mahasiswa menyatakan bahwa pelajaran agama memicu rasa jijik mereka terhadap agama yang tidak mereka setujui. 58,55 persen responden mahasiswa menunjukkan pandangan agama yang intens dan obsesif, yang mengejutkan. Artinya dia hanya menegaskan apa yang dia pahami dan tidak sependapat dengan penafsiran orang lain (PPIM UIN Jakarta, 2017). Beberapa kajian tentang intoleransi, anti kebhinekaan, dan radikalisme di sekolah dan madrasah telah dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan. Mereka umumnya sepakat bahwa radikalisme dapat masuk ke lingkungan sekolah melalui jalur berikut: peran guru dalam membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran, bahan ajar yang diduga mengandung muatan intoleransi, dan kuatnya doktrin alumni dalam kegiatan siswa yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Sekolah, kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler seperti Spiritualitas Islam (rohis), dan kebijakan prinsip yang kurang mengharapkannya (Rofik & Misbah, 2021).

Untuk mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan sekolah, Muhidin, dkk (2020) mengatakan madrasah harus mengadopsi berbagai kegiatan, Pertama, mengembangkan budaya sekolah lokal yang mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, saling menghormati, sopan santun, dan sebagainya. Budaya sekolah adalah seperangkat nilai, asumsi, pemahaman, keyakinan, dan harapan bersama yang digunakan sebagai pedoman perilaku dalam memecahkan masalah baik secara individu maupun kolektif. baik pribadi maupun kolektif Mereka menghadapi masalah internal maupun eksternal. Sementara itu, pembinaan wasathiyah (tengah) di sekolah sangat penting sebagai landasan nilai, sikap, semangat, dan perilaku bagi guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan siswa itu sendiri dalam rangka menciptakan budaya religius di lingkungan sekolah. Kedua, sekolah harus berperan aktif dalam pembicaraan atau dialog keagamaan antar umat beragama sejak dini guna membangun saling pengertian di antara anak-anak yang berbeda pandangan agama. Jenis wacana lintas agama ini merupakan cara yang efisien bagi siswa untuk membiasakan diri bercakap-cakap dengan para praktisi berbagai agama. Ketiga, kurikulum dan buku teks yang digunakan di sekolah sangat vital dalam implementasi moderasi beragama, terutama kurikulum yang memuat cita-cita pluralisme (Bhinneka Tunggal Ika) dan toleransi beragama. Literatur agama yang digunakan di kelas juga harus menjadi karya yang membantu anak-anak mengembangkan percakapan dan gagasan tentang apresiasi keragaman yang inklusif dan masuk akal.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini dirasa perlu untuk mengkaji kesiapan program moderasi beragama di lingkungan sekolah/madrasah. Diharapkan dengan menanamkan nilai-nilai budaya keagamaan ke dalam lingkungan sekolah, serta kepedulian yang kuat dari para guru dan pengelola lembaga pendidikan, siswa akan mengembangkan ketakwaan individu dan sosial, sehingga memungkinkan mereka membangun moral, peradaban, dan karakter bangsa yang bermartabat di lingkungan sekolah dimasa yang akan datang.

## Metode

Peneliti menggunakan teknik kualitatif dengan gaya penelitian deskriptif dalam penelitian ini untuk menganalisis kesiapan program moderasi beragama di berbagai sekolah/madrasah di Indonesia. Pendekatan penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah proses investigasi, artinya kita dapat memahami fenomena sosial secara bertahap sebelum menerapkannya, seringkali dengan membandingkan, membandingkan, merefleksi, mengkategorikan, dan mengklasifikasikan item-item studi. Menurut Moleong (1989), analisis data kualitatif

dapat dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikan data, mengklasifikasikannya menjadi bagian-porsi yang dapat diatur, meringkas, mencari, dan menemukan pola, mengevaluasi apa yang signifikan, apa yang telah dipelajari, dan memilih apa yang akan diajarkan diinformasikan kepada orang lain Guru dari beberapa sekolah/madrasah di Indonesia menyediakan data untuk penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terbuka kepada guru di beberapa sekolah/madrasah di Indonesia. Responden diajukan 35 pertanyaan tentang sekolah/madrasah kesiapannya untuk meningkatkan penerapan moderasi beragama.

Sedangkan pada tahap analisis data, peneliti secara deskriptif mengkaji dan melaporkan hasil penelitian dengan menggunakan model alur Milles & Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Penyajian data atau representasi data adalah kumpulan informasi yang sistematis dari mana kesimpulan dapat ditarik. Hal ini dilakukan karena data yang dikumpulkan selama metode penelitian kualitatif biasanya berupa cerita, yang harus disederhanakan tanpa kehilangan makna.

## Hasil dan Pembahasan

### Moderasi Beragama di Lingkungan ASN

Berdasarkan hasil angket yang dilakukan kepada beberapa guru madrasah mengenai tujuan penguatan dan peningkatan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan ASN, mayoritas responden menyatakan bahwa tujuan penguatan moderasi beragama di lingkungan ASN adalah agar Aparatur menjadi panutan bagi masyarakat, mampu menghasilkan undang-undang. mendukung kegiatan keagamaan moderat. Lebih lanjut, moderasi beragama, menurut responden, merupakan upaya mengembalikan praktik keagamaan pada intinya dan bahwa agama berfungsi untuk menopang harkat dan martabat manusia. Beberapa tanggapan tambahan dari responden menyatakan bahwa menanamkan cita-cita moderasi beragama di ASN, khususnya di kalangan guru, merupakan wujud keinginan sekolah/madrasah untuk menerapkan konsep moderasi beragama di lembaga pendidikan. Selanjutnya terkait pertanyaan terkait indikator moderasi beragama, seluruh responden menjawab bahwa ada 4 indikator utama moderasi beragama, yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Item selanjutnya dalam angket yang ditanyakan kepada responden adalah tentang pentingnya pemahaman konsep moderasi beragama bagi ASN. Secara keseluruhan, 73 responden yang memberikan jawaban menyatakan bahwa pemahaman konsep moderasi beragama sangat penting. Mereka menambahkan, hal ini dimaksudkan agar dengan memahami pengertian moderasi beragama, ASN terhindar dari melakukan kegiatan yang dapat merugikan moderasi beragama. Menyebarkan informasi yang salah tentang masalah agama, misalnya, dapat membahayakan aturan toleransi beragama di Indonesia. Temuan di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa tiga puluh orang (54,5 persen) dari 55 ASN yang akan mengikuti program moderasi beragama menyatakan memahami prinsip dan indikator moderasi beragama (Puslitbang Kemenag RI, 2021).

Pengkajian program moderasi keagamaan di sekolah/madrasah tentunya tidak lepas dari peran ASN yang membidangi lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Terkait dengan hal tersebut, peneliti mengajukan item pertanyaan dalam angket yang diberikan kepada responden yaitu peran ASN Kementerian Agama dalam mensosialisasikan konsep moderasi beragama. Dari pertanyaan tersebut peneliti menemukan jawaban yang bervariasi, responden mengatakan bahwa ASN merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan pesan tentang konsep moderasi di masyarakat. ASN Kementerian Agama diharapkan menjadi yang terdepan sebagai contoh penerapan nilai-nilai moderasi beragama, khususnya dalam konteks cinta tanah air. Purbajati (2020) meyakini bahwa guru memiliki peran penting dalam inisiatif peningkatan kualitas pendidikan. Karena seorang guru berfungsi sebagai panutan bagi siswa, memiliki profesionalisme seorang guru sangat penting untuk mencapai pendidikan yang hebat. ASN sebagai trafo memiliki peran penting dalam menanamkan prinsip-prinsip moderasi beragama di masyarakat. Cara penyampaian bisa verbal (penjelasan langsung) atau nonverbal (penjelasan tidak langsung) atau melalui serangkaian perilaku). Dalam segala hal, seorang guru menjadi figur atau panutan. Demikian halnya ketika berinteraksi dengan orang lain, bereaksi terhadap situasi tertentu, dan memahami atau menafsirkan informasi yang masih diperdebatkan (Kuswanto, 2014 & Purbajati, 2020).

### Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah/Madrasah

Dalam penelitiannya tentang kebijakan moderasi beragama di lembaga pendidikan, Ahnaf (2013) menyatakan bahwa masalah lembaga pendidikan dalam menyebarkan nilai toleransi dan penghormatan terhadap keragaman agama tidak hanya terletak pada masalah kurikuler tetapi juga pada kemampuan pejabat sekolah.

Strategi, maksud, dan tujuan kebijakan moderasi beragama di lingkungan sekolah harus dipahami oleh otoritas sekolah agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Berangkat dari penjelasan di atas, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait kebijakan program moderasi beragama di lingkungan sekolah/madrasah. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah bagaimana pembuat kebijakan moderasi beragama di lingkungan sekolah memandang program kebijakan moderasi beragama itu sendiri. Mayoritas dari 73 responden menyatakan bahwa para pelaksana kebijakan moderasi beragama telah memahami sepenuhnya konsep moderasi beragama. Namun, beberapa responden mengakui masih ada beberapa pelaksana kebijakan yang belum memahami esensi dan pentingnya moderasi beragama itu sendiri. Studi ini menunjukkan bahwa mayoritas pengelola sekolah yang menerapkan kebijakan moderasi beragama memiliki pengetahuan yang kuat tentang moderasi beragama. Visi dan tujuan madrasah harus menjadi titik tolak pengarusutamaan moderasi Islam. Pandangan ke depan yang ideal dari prediksi ideal adalah dengan mengingat visi. Visi adalah tujuan, sedangkan misi adalah bagaimana menuju kesana. Sebisa mungkin visi dan tujuan yang telah ditetapkan memasukkan moderasi Islam sebagai bagian dari profil ideal yang dicita-citakan. Visi dan tujuan ini seharusnya tidak hanya menjadi pertunjukan atau selembar kertas; harus menjadi semangat hidup dan nafas yang menjiwai seluruh warga madrasah. Oleh karena itu, visi dan tujuan madrasah harus dikembangkan secara kolaboratif dan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan madrasah (Alim & Munib, 2021).

Dalam sebuah organisasi, koordinasi memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu faktor pendukung yang diperlukan untuk menggerakkan orang untuk melaksanakan suatu kebijakan yang terstruktur. Karena pada dasarnya koordinasi merupakan suatu bentuk kerjasama, saling menghormati dan menghargai tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. E.F.L. Brech sebagaimana dikutip oleh Hasibuan (2007) mengatakan “koordinasi adalah untuk menyeimbangkan dan menggerakkan tim dengan menyediakan lokasi yang sesuai untuk aktivitas kerja masing-masing dan menjaga agar aktivitas tersebut dilakukan secara harmonis di antara para anggota itu sendiri”. Untuk mensukseskan program moderasi beragama di lingkungan sekolah/madrasah tentunya diperlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Koordinasi tentunya diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pelaksanaan program moderasi beragama di sekolah/madrasah. Kaitannya dengan penerapan kaidah moderasi beragama juga sama, membutuhkan hubungan yang solid antara komponen sekolah dan madrasah seperti tokoh agama, orang tua, siswa, dan lain-lain. Untuk itu, lembaga pendidikan dituntut untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait. Berkaitan dengan uraian di atas, peneliti menemukan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh beberapa sekolah dan madrasah di Indonesia dalam rangka mewujudkan program moderasi beragama masih belum berjalan. Ini harus menjadi prioritas utama bagi pembuat kebijakan di setiap sekolah. Tidak diragukan lagi, ini mungkin salah satu elemen yang menghambat efektivitas program moderasi beragama di lingkungan sekolah/madrasah jika tidak ada koordinasi yang memadai. Koordinasi sekolah dapat berbentuk koordinasi eksternal maupun internal.

Koordinasi eksternal meliputi kerjasama dengan Kementerian Agama, tokoh agama, masyarakat, dan sebagainya. Koordinasi internal dapat berupa kerjasama antara kepala sekolah, pendidik, staf, dan siswa. Namun dari hasil penyebaran angket, peneliti juga menemukan bahwa di beberapa sekolah/madrasah di Indonesia koordinasi sudah berjalan meskipun dirasa belum optimal. Berdasarkan temuan tersebut, koordinasi harus menjadi salah satu prioritas utama dalam menerapkan kebijakan moderasi beragama di sekolah untuk menciptakan Integrasi, Sinkronisasi, dan Penyederhanaan untuk mencapai tujuan program moderasi beragama seefektif dan seefisien mungkin. Koordinasi memudahkan pimpinan untuk mensinergikan dan mengintegrasikan tugas saat ini dengan pihak terkait. Mendukung pimpinan dalam mensinergikan dan mengendalikan tumbuh kembang pelaksanaan program moderasi keagamaan antara satu unit dengan unit lainnya di lingkungan sekolah dan madrasah. Pemimpin dapat mengkoordinasikan operasi fungsional dengan berbagai tujuan masing-masing unit untuk mencapai tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Selain koordinasi, untuk mempersiapkan implementasi kebijakan moderasi beragama di sekolah/madrasah, ada juga salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya pedoman yang jelas tentang hak, dan kewajiban (wewenang) ASN dalam penguatan agama. moderasi. Pedoman yang jelas tentang hak dan tanggung jawab ASN di lingkungan sekolah/madrasah relevan dengan teori “pelembagaan dan pelaksanaan moderasi beragama” yang menyatakan bahwa memiliki pedoman yang jelas bagi pegawai merupakan salah satu cara untuk menerjemahkan moderasi beragama ke dalam institusi, struktur, atau institusi. unit yang mempertimbangkan dengan cermat pilihan untuk menerjemahkan cita-cita ini ke dalam program dan kegiatan yang terukur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, para akademisi meyakini bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berada di garda terdepan dalam menjaga dan mempromosikan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Sebagai pelaksana, Aparatur Sipil Negara harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip inti ajaran agama, meningkatkan toleransi, meningkatkan loyalitas kepada negara, dan

menolak segala bentuk kekerasan beragama (Litaloly, 2020). Namun berdasarkan temuan peneliti terungkap bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa selama ini para pelaksana kebijakan moderasi beragama di sekolah belum memiliki pedoman khusus mengenai hak dan kewajiban (wewenang) ASN dalam memajukan moderasi beragama bahkan meskipun di beberapa sekolah/madrasah pelaksana kebijakan sudah memiliki pedoman yang jelas. dapat mengatur dan menjabarkan hak dan kewajiban ASN dalam implementasi kebijakan moderasi beragama. Lebih lanjut, mayoritas responden ASN juga mengatakan bahwa selama ini di beberapa sekolah/madrasah belum ada SOP (Standard Operating Procedure) yang jelas dari para pelaksana kebijakan mengenai penerapan moderasi dalam program moderasi beragama. Keberadaan SOP sangat diperlukan untuk secara khusus memperjelas atau menetapkan aturan mengenai peran, tanggung jawab, dan fungsi ASN dalam mencapai program moderasi beragama di sekolah atau madrasah. Mengingat perlunya penerapan SOP dalam program moderasi beragama, berbagai manfaat atau keuntungan dapat diperoleh dari SOP tersebut. Hal ini dimungkinkan selama SOP diikuti dengan benar. SOP yang kurang memadai menghambat proses pencapaian tujuan dan misi program moderasi beragama. Jadi, jika SOP diikuti dengan benar, lembaga pendidikan (dalam hal ini sekolah/madrasah) akan dapat menjalankan program dengan baik (Fajar Nur'Aini, 2016). Di sisi lain, ASN juga mengatakan selama ini dalam pelaksanaan program moderasi beragama, para guru hanya mendengarkan dan mempelajari ideologi negara untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama.

### **Fasilitas Penunjang dalam Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah/Madrasah**

Pengaruh era digital terhadap praktik keagamaan masyarakat, menurut buku Heidi Campbell *When Religion Meets New Media* (2010), adalah memudarnya kesetiaan kepada organisasi keagamaan, pergeseran otoritas keagamaan, meningkatnya individualisme, dan perubahan dari pluralisme ke tribalisme. Jika Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, ingin menjadi laboratorium perdamaian, harus terus mengarusutamakan moderasi Islam melalui forum diskusi dan platform internet. Indonesia, sebagaimana diketahui, adalah negara yang beragam dan kosmopolitan dengan berbagai suku, agama, bahasa, ras, dan varian lainnya. Meskipun demikian, varietas ini memungkinkan untuk hidup berdampingan secara harmonis. Berangkat dari uraian di atas, peneliti memasukkan item pertanyaan terkait fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang telah dimiliki oleh para pelaksana kebijakan program moderasi beragama di sekolah/madrasah.

Dari butir pertanyaan tersebut peneliti memperoleh hasil bahwa pada umumnya sekolah/madrasah di Indonesia telah memiliki sarana dan prasarana teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program moderasi beragama. Namun sebaliknya, sebagian kecil responden menyatakan bahwa lembaga pendidikan tempat mereka berada belum memiliki fasilitas teknologi yang memadai untuk mendukung program moderasi keagamaan. Beberapa faktor penyebab minimnya teknologi yang dapat dimanfaatkan, antara lain letak sekolah atau madrasah yang terpencil dan jaringan internet yang buruk sehingga guru dan ASN belum dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Melalui kancah digital, integrasi moderasi keagamaan di sekolah/madrasah di seluruh Indonesia berupaya membawa sesuatu yang sebelumnya berada di pinggiran, yang hanya diketahui segelintir orang dan organisasi, dan bahkan kurang esensial, ke tengah, di mana bisa menjadi pusat. inti. tengah. Seluruh masyarakat bisa melihatnya. dicerna dan dilakukan (Hefni, 2020). Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan ruang digital, yang memiliki beberapa tujuan, aplikasi, kapasitas, dan potensi.

### **Anggaran dalam Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah/Madrasah**

Dalam skala besar dan kecil, anggaran tidak dapat dipisahkan dari pengadaan suatu kegiatan. Sosialisasi moderasi beragama memegang peranan penting dalam setiap kegiatan yang tentunya membutuhkan anggaran, namun pelaksanaan penganggaran seringkali berbenturan dengan berbagai proses dan aturan. Pada tahun 2022, Yandri Susanto, Ketua Komisi VIII DPR RI, menyebutkan anggaran moderasi keagamaan lintas direktorat jenderal tahun ini sebesar Rp 3,2 triliun (Permana, 23 September 2021). Program Moderasi Keagamaan merupakan salah satu dari tujuh kebijakan utama yang dikembangkan Kementerian Agama berdasarkan penataan tugas dan fungsi seluruh entitas lingkungan.

Pilar dasar pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah moderasi beragama. Yang cukup disayangkan adalah masih cukup banyak ASN di lingkungan sekolah/madrasah yang tidak mengetahui secara spesifik besaran total anggaran untuk program moderasi keagamaan ini. Namun jika dilihat dari total anggaran yang ada, hal ini menunjukkan keseriusan para pengambil kebijakan dalam melaksanakan program moderasi beragama, khususnya di lingkungan sekolah/madrasah. Para guru juga mengakui bahwa sekolah/madrasah belum memiliki strategi cadangan yang bisa diterapkan jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk memperkuat moderasi beragama.

---

### **Komitmen dalam Penguatan Moderasi Beragama di Sekolah/Madrasah**

Moderasi agama membutuhkan kesabaran. Setiap individu harus menerima sepenuhnya tindakan yang dilakukan Kementerian Agama untuk memajukan cita-cita moderasi beragama, khususnya di sekolah, sebagai nilai seorang yang beragama terhadap agama yang dianutnya. Inisiatif ini akan efektif jika didukung oleh semua pihak. Pihak, termasuk tidak hanya pemerintah tetapi juga pemangku kepentingan dengan cakupan yang lebih sempit, seperti keluarga dan sekolah. Penguatan moderasi beragama di sekolah/madrasah harus dimulai dengan tekad semua pihak untuk bekerja sama agar terbiasa berinteraksi dengan semua golongan dan tidak terkesan hanya berdiri dalam satu kelompok. Pengabdian ini telah dibuktikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Kementerian Agama adalah kementerian semua agama. Tinggal bagaimana semua bawahannya menerapkan etos ini di lembaga pendidikan. Sejalan dengan uraian di atas, temuan peneliti juga menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan di tingkat sekolah dan madrasah di Indonesia telah berkomitmen penuh untuk memperkuat moderasi beragama. Untuk mendorong moderasi beragama diterapkan pada anak, para pelaksana kebijakan di sekolah harus membuat komitmen yang kuat. Akibatnya, budaya berpikir moderat akan muncul sebagai akibat dari budaya berpikir siswa (Fauzian, dkk, 2021).

Pendekatan pembiasaan, dengan perilaku rutin, spontan, dan keteladanan, digunakan untuk mengembangkan moderasi keagamaan dalam mata pelajaran, muatan lokal, dan kegiatan ekstrakurikuler. Perilaku ini merupakan hasil budaya siswa dan dapat digunakan serta diimplementasikan dalam situasi sosial (pemberdayaan). Implikasi Penguatan Moderasi Beragama Melalui Kearifan Lokal Dalam Upaya Mewujudkan Budaya Berpikir Moderat Di Kalangan Siswa Melalui KMA 184, Kemenag telah mendorong moderasi beragama dalam kurikulum madrasah. Konsep pengarusutamaan memasukkan moderasi beragama berupa kearifan lokal ke dalam kurikulum. Lebih lanjut, para responden juga menjelaskan bahwa tidak hanya pimpinan saja yang memiliki komitmen tinggi, namun seluruh anggota di setiap unit juga mendukung penuh penguatan implementasi moderasi beragama.

### **Implementasi Penguatan Moderasi Beragama di Sekolah/Madrasah**

Dalam pelaksanaan penguatan moderasi beragama, empat sikap yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian moderasi beragama: komitmen nasional, toleransi, non-kekerasan, dan penerimaan tradisi. Keempat sikap tersebut dapat dijabarkan lebih rinci yang selanjutnya dapat dijadikan acuan untuk mengukur keberhasilan program ini. Satu hal yang disayangkan adalah masih banyak sekolah dan madrasah yang tidak memiliki kriteria baku sebagai acuan untuk melihat keberhasilan kebijakan moderasi beragama di sekolah-sekolah tersebut. Hal ini tentunya sedikit menyulitkan pelaksana kebijakan dan guru untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan program yang dijalankannya. Proses evaluasi, menurut responden, juga tidak dilakukan secara rutin setiap tahun. Hal ini tentunya menyulitkan sekolah/madrasah yang bersangkutan untuk dapat mengambil langkah-langkah perbaikan strategi dalam menerapkan kebijakan moderasi beragama di sekolah. Hasil data yang diperoleh dari kuisioner juga mengungkapkan bahwa sekolah/madrasah belum menjalin Kerjasama (MOU) dengan instansi lain.

Seperti diketahui, kerjasama dengan berbagai pihak diperlukan untuk mencapai tujuan program moderasi beragama. Salah satu pihak yang dapat dijadikan mitra oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan program moderasi beragama adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah untuk membangun, memelihara, dan memperkuat kelompok-kelompok agama guna menumbuhkan kedekatan dan kesejahteraan (Rofik & Misbah, 2021). Pembentukan FKUB berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 oleh Menteri Dalam Negeri dan masing-masing Menteri Agama. Pentingnya FKUB dalam menjaga kedekatan umat beragama sangat penting. FKUB menjadi wadah bagi tujuan dan tantangan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

### **Simpulan**

Madrasah dipandang sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang relatif berhasil menanamkan Islam moderat. Moderasi Islam dengan nilai-nilai karakternya telah menjadi perilaku dan budaya seluruh warga madrasah. Madrasah dapat menjadi contoh pendidikan moderasi keagamaan bagi lembaga pendidikan lainnya. Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sekolah/madrasah masih belum siap untuk melaksanakan program moderasi beragama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator yang belum terpenuhi oleh sekolah dan madrasah terkait untuk mencapai tujuan keberhasilan program moderasi beragama. Pembuat kebijakan dan pelaksana harus memperhatikan jenis ketidaksiapan ini.

Proses perbaikan dan peninjauan ini tidak diragukan lagi penting jika program moderasi keagamaan ini ingin berhasil. Salah satu sektor yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan terkait dengan tidak adanya mitra kerja sama yang dapat bersinergi dengan sekolah/madrasah dalam melaksanakan dan mengoptimalkan kebijakan moderasi beragama yang telah dicanangkan Kementerian Agama.

## Referensi

- Alim, M. S., & Munib, A. (2021). Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama di Madrasah. *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas*, 9(2), 263. <https://doi.org/10.31942/pgrs.v9i2.5719>
- Anggaran Moderasi Beragama Dari Rp 400 M Jadi Rp 3,2 T | Republika online. (2021, September 23). Republika Online. <https://republika.co.id/berita/qzvo84335/anggaran-moderasi-beragama-dari-rp-400-m-jadi-rp-32-t>
- Az Zafi, A. (2020). Penerapan nilai-nilai moderasi al-qur'an dalam pendidikan Islam. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 21(1), 23. <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-02>
- Campbell, H. (2010). *When religion meets new media*. Routledge.
- Dawing, D. (2018). Mengusung moderasi Islam Di tengah masyarakat multikultural. *Rausyan Fikir: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, 13(2), 225-255. <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.266>
- Definisi Koordinasi Di Dalam Objek Organisasi Menurut Para Ahli. (n.d.). Materi Belajar. <https://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-koordinasi-di-dalam-objek.html>
- Fajar Nur'aini D.F., M. (2019). *Panduan Lengkap Menyusun SOP & KPI*. Anak Hebat Indonesia.
- Fauzian, R., Ramdani, P., & Yudiyanto, M. (2021). Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Membentuk Sikap Moderat Siswa Madrasah: Moderasi Beragama. *AL-WIJIDAN: Journal of Islamic Education Studies*, 6(1), 1-14. <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan/article/view/933>
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1-22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>
- Kementerian Agama RI (2019). *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Litiloly, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama Di Lingkungan Kementerian Agama Kota Ambon. *Jurnal 12 Waiheru*, 6(1), 102-118. <http://ejurnal12waiheru.org/index.php/ejurnal12waiheru/article/view/13>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Muhammad Nur Rofik, & Misbah, M. (2021). Implementasi program Moderasi Beragama Yang Dicanangkan oleh Kementerian agama Kabupaten Banyumas Di Lingkungan Sekolah. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 12(2), 230-245. <https://doi.org/10.31849/lectura.v12i2.7611>
- Muhidin, M., Makky, M., & Erihadiana, M. (2021). Moderasi Dalam Pendidikan Islam Dan Perspektif Pendidikan Nasional. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 22-33. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.456>
- PPIM UIN Jakarta. (2017). *Redam Radikalisme Butuh Pendidikan Keagamaan Inklusif*, Rabu, 8 November 2017 dari <https://uinjkt.ac.id>.
- Purbajati, H. I. (2020). Peran Guru Dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 182-194.
- Schwartz, S. S., Arieiev, H., Buchori, A., Zaman, A. N., & Foundation., L. (2007). *Dua wajah Islam: Moderatisme vs fundamentalisme dalam wacana global*.
- Wawasan moderasi beragama Di lingkungan aparatur sipil negara (Asn). (n.d.). [www.balitbangdiklat.kemenag.go.id](http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id). <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/wawasan-moderasi-beragama-di-lingkungan-aparatur-sipil-negara-asn>